

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2021

Jl. Arif Rahman Hakim No,10 Telanai Pura

Jambi No. Telp/No. Faks

Faximile

(0741)

Website

.....

Email: Kode Pos

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 disusun berdasarkan Target Indikator Kinerja .LKjIP Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan untuk dikelola. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jambi, Januari 2021

Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Jambi,

AKHMAD BESTARI, SH, MH
Pembina Utama Muda
197405081999031004

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang memuat rencana, capaian, dan realisasi kinerja sesuai sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan dan mekanisme program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang berkelanjutan, dengan indikator kinerja persentase pengelolaan hutan yang lestari dengan target sebesar 0,5% dengan capaian kinerja dinas kehutanan provinsi jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 0,57%.
2. Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan hutan dengan indikator persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar sebesar 5 % dengan capaian kinerja dinas kehutanan provinsi jambi pada tahun 2020 adalah penurunan sebesar 79,5 %.
3. Sasaran meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi, dengan indikator persentase penurunan lahan kritis sebesar 0,1 % dengan capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2020 adalah sebesar 0.28 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Kehutanan yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan Kehutanan secara keseluruhan.
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan Kehutanan melalui pendekatan yang bersifat kualitatif.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai dasar bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Demikian deskripsi informatif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam bentuk ringkasan eksekutif. Laporan selengkapnya tersaji dalam naskah LKj Dinas Kehutanan Provinsi Jambi beserta lampirannya, sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020.

Daftar Isi



KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Struktur Organisasi.....	9
1.2 Tugas dan Fungsi.....	11
1.3 Isu-Isu Strategis.....	22
1.4 Keadaan Pegawai	22
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	24
1.6 Keuangan	25
1.7 Sistematika LKjIP	26
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
2.1 Perencanaan Strategis	28
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	29
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	30
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan	31
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	33
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2020.....	35
2.3.1 Target Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	35
2.3.2 Alokasi Anggaran Persasaran Strategis	35
2.4 Instrumen Pendukung.....	36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020	37
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	38
3.2.1. Sasaran	38
3.2.2. Sasaran	44
3.2.3. dst.....	49
3.3. Realisasi Anggaran	58

BAB IV PENUTUP	62
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi

Lampiran 2 Matriks Renstra 2016-2021

Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya

Lampiran 5 Penghargaan yang Pernah Diterima

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020	25
Tabel 2.1	Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021	30
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021	31
Tabel 2.3	Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2022	34
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	35
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi	36
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020	38
Tabel 3.3	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020	39
Tabel 3.4	Capaian Kinerja 2017-2020	43
Tabel 3.5	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020	44
Tabel 3.6	Capaian Kinerja 2017-2020	48
Tabel 3.7	Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020	51
Tabel 3.8	Capaian Kinerja 2017-2020	56
Tabel 3.9	Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah	57
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020	60
Tabel 3.11	Analisis Efisiensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020	61

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kehutanan.....	10
Gambar 1.2	Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020	23
Gambar 1.3	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020	23
Gambar 1.4	Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020.....	24
Gambar 1.5	Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020	24
Gambar 1.6	Sistematika Laporan	26
Gambar 1.7	Grafik Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang Berkelanjutan	43
Gambar 1.8	Grafik Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.....	49
Gambar 1.9	Grafik Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	57

BAB 1

Pendahuluan

BAB I berisi :

- 1.1. Struktur Organisasi
- 1.2. Tugas dan Fungsi
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Keadaan Pegawai
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Keuangan
- 1.7. Sistematika LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1291/KEP.GUB/SETDA.ORG-3.3/2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
2. Mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan salah satu instansi Perangkat Daerah di Provinsi Jambi yang menangani urusan dibidang Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan.

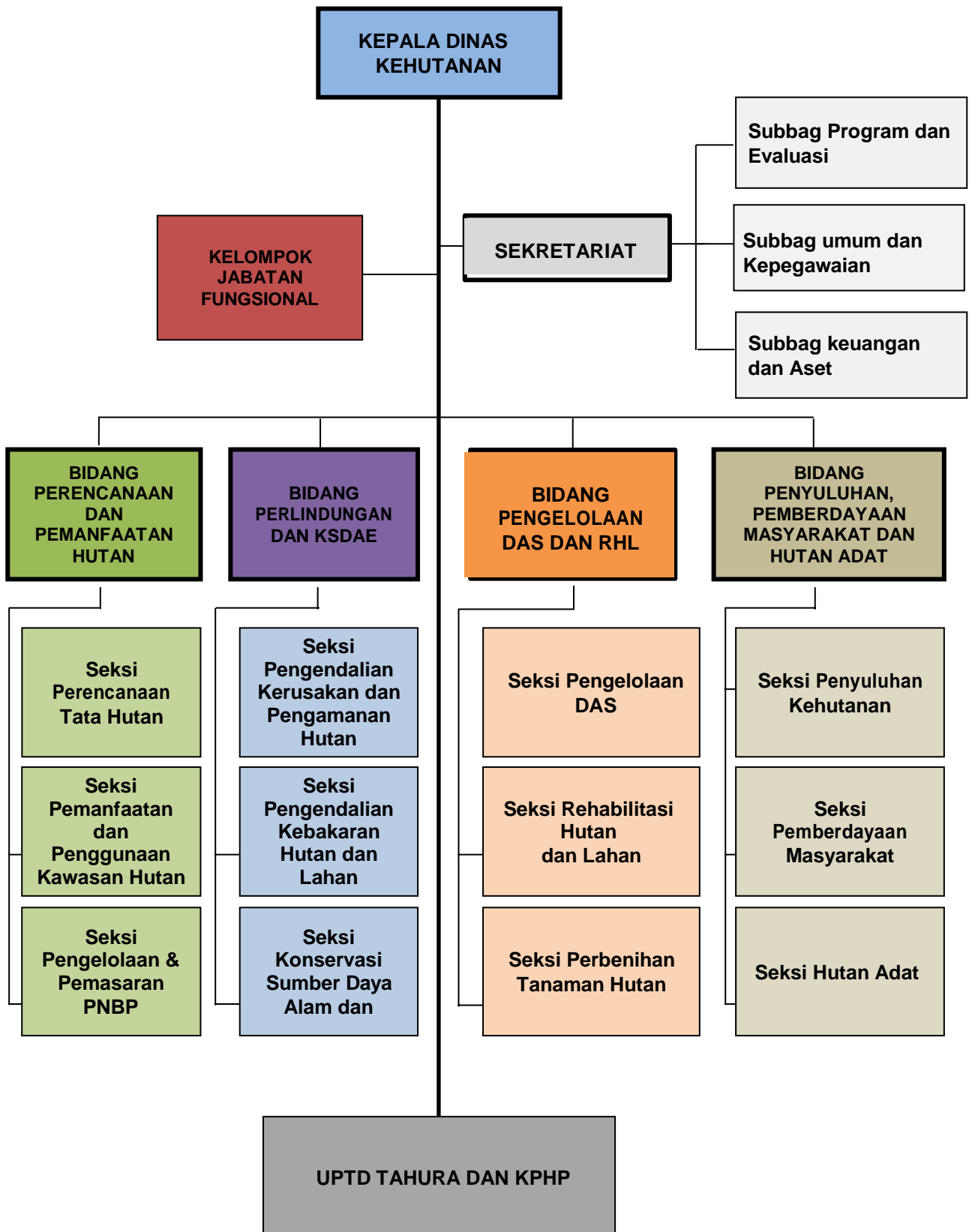
Dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tatacara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
3. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional.
4. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kehutanan



1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI.

Tugas Kepala Dinas yaitu membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi yaitu meliputi, tata kesatuan pengelolaan hutan, rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan , pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, pemanfaatan jasa lingkungan), rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, pelaksanaan pengelolaan aset pemerintahan Provinsi Jambi lainnya, perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 M3 / tahun, dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus.
- c. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, yaitu meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas kabupaten /kota, perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi dan / atau tidak termasuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konferensi internasional dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

- d. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan diprovinsi.
- e. Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas kabupaten / kota dan dalam kabupaten / kota dalam 1 (satu) provinsi.
- f. Pelaksanaan koordinasi kehutanan dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan.
- g. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS.

Tugas pokok sekretaris adalah menyusun, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rencana program, pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana kantor, tata keuangan, kepegawaian, data dan informasi kehutanan dan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sedangkan **fungsinya** pelaksanaan koordinasi rencana program dan anggaran, Evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, pengelolaan urusan keuangan dan Pengelolaan data dan informasi Kehutanan, pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, keuangan , pengelolaan aset Dinas Kehutanan serta hubungan masyarakat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dibantu 3 (Tiga) Sub Bagian, Yaitu :

- a. Sub Bagian Program dan Evaluasi.
- b. Sub Bagian Keuangan dan Asset.
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN.

Tugas Pokok bidang ini adalah menyiapkan perumusan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi serta pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sedangkan **fungsinya** adalah :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi penatagunaan hutan, dan penyusunan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan / KPHL dalam 1 (satu) Provinsi.
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi , bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan / atau KPHL dalam 1 (satu) Provinsi.
- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi.
- d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan, usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Produksi di wilayah Provinsi.
- e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada hutan lindung di wilayah Provinsi.
- f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi.
- g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan non kawasan hutan menjadi kawasan hutan , penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi.

- h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu, dan izin koridor di wilayah provinsi.
- i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan di provinsi.
- j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Kepala Bidang dibantu 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Perencanaan Tata Hutan.
- b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- c. Seksi Pengelolaan, Pemasaran dan PNBK.

4. **BIDANG Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.**

Tugas Pokok bidang ini adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pada pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari. Perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak di lindungi dan atau tidak masuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang di lindungi, hasil konferensi internasional, pengawasan kawasan bernilai ekosistem penting daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

Adapun **fungsinya** adalah :

- a. Penyiapan bahan kebijakan pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan, kawasan hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum.
- b. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi / tidak masuk dalam pelarangan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, hasil konfrensi internasional.

- c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di Provinsi.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala bidang dibantu 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan.
- b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

5. **BIDANG Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)**

Tugas Pokok bidang ini adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di Provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara, pelaksana kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan Hutan yang menjadi aset pemerintah provinsi dan kawasan hutan dengan tujuan khusus lainnya.

Fungsinya adalah :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah Provinsi.
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah provinsi.
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang ini membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).
- b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
- c. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.

6. BIDANG Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat.

Tugas Pokok bidang ini adalah membantu dinas dalam rangka merumuskan kebijakan teknis, memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial.

Adapun **fungsinya** adalah :

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan di provinsi.
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi.
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan perhutanan sosial meliputi : hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat dan kemitraan dalam provinsi.
- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.
- e. Pelaksanaan pemetaan dan pengukuran areal konflik.
- f. Pemanfaatan secara lestari TAHURA lintas daerah kabupaten/kota.
- g. Pelaksanaan konsultasi ke Kementerian LH dan Kehutanan dalam rangka penyelesaian konflik.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi konflik di kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang ini membawahi 3 (Tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Penyuluhan Kehutanan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Seksi Hutan Adat.

7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang sesuai keahliannya masing –masing.
2. Kelompok jabatan fungsional dapat di bagi – bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing – masing dan di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
3. Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
4. Kebutuhan jabatan fungsional di tentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

8. UPTD TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA)

Tugas dari UPTD ini adalah melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan Dinas Kehutanan di bidang Rehabilitasi, Pengawasan Dan Pengelolaan Hutan di wilayah Tahura. Untuk melaksanakan tugas Taman Hutan Raya mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah , jangka pendek dan rencana tahunan.
- b. Pelaksanaan rehabilitasi hutan (penanaman, pemeliharaan dan pengamanan).
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh areal TAHURA.
- d. Pelaksanaan kegiatan keamanan dan penjagaan areal TAHURA.
- e. Pelaksanaan koordinasi seluruh kegiatan dengan instansi terkait
- f. Pelaksanaan pembangunan kehutanan.
- g. Peyelenggaraan pengelolaan hutan.
- h. Pelaksanaan penjabaran kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi dan Kab/Kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan.
- i. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta pengendalian.
- j. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya.

- k. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Taman Hutan Raya (TAHURA) terdiri dari:

- a. Kepala UPTD TAHURA
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

9. UPTD KPHP

Pembentukan UPTD KPHP berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 yang menetapkan 11 (sebelas) UPTD KPHP dengan wilayah pengelolaan sebagai berikut :

- a. UPTD KPHP Kerinci Unit I dengan luas ± 34.250 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.
- b. UPTD KPHP Bungo Unit II dan III dengan total luas ± 125.792 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Bungo.
- c. UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI dengan total luas ± 203.469 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Merangin.
- d. UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun dengan luas ± 121.102 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Sarolangun.
- e. UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun dengan luas ± 109.766 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Sarolangun.
- f. UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX dengan luas ± 148.685 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tebo.
- g. UPTD KPHP Tebo Timur Unit X dengan luas ± 106.456 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tebo.
- h. UPTD KPHP Batang hari Unit XI dan XII dengan luas ± 188.180 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Batanghari.
- i. UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII dengan luas ± 107.839 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Muaro Jambi.

- j. UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV dengan luas ± 84.515 ha berada di wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- k. UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII berada di wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat , yang terdiri dari:
 - 1. Unit XV dan XVI merupakan KPHP dengan total luas ± 216.477 ha
 - 2. Unit XVII merupakan KPHL dengan luas ± 15.965 ha.

Susunan organisasi UPTD KPHP terdiri dari :

- a. Kepala UPTD KPHP
- b. Sub bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
- d. Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Kelompok jabatan fungsional
- f. Resort

UPTD KPHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas di bidang Pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHP dan KPHL yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan fungsinya tugas UPTD KPHP terdiri dari :

- 1. Pelaksanaan tata hutan pada wilayah unit KPHP dan KPHL.
- 2. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan unit KPHP dan KPHL
- 3. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL.
- 4. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah unit KPHP dan KPHL.
- 5. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah unit KPHP dan KPHL.
- 6. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah unit KPHP dan KPHL.
- 7. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL.
- 8. Pengembangan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan unit KPHP dan KPHL.
- 9. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang Kehutanan.

10. Pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di wilayah unit KPHP dan KPHL.
11. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesatuan pengelolaan hutan.
12. Pelaksanaan kegiatan bidang Kehutanan di luar kawasan hutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai peran yang strategis yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana tercermin dalam PERDA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan. Dilakukan secara lebih aplikatif, antara lain:

1. Memantapkan status dan fungsi kawasan hutan serta kelembagaan pengelolaan hutan.
2. Membuka peluang usaha dibidang kehutanan bagi masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan hutan lestari.
3. Merehabilitasi hutan dan lahan kritis.
4. Menurunkan illegal logging, perambahan hutan serta kebakaran hutan
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya fungsi dan kelestarian hutan
6. Meningkatkan penerimaan Negara dari Sektor Kehutanan.

Untuk melaksanakan peran strategis tersebut, sampai saat ini masih ditemui beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap status dan fungsi kawasan hutan sehingga masih terjadi konflik lahan antara masyarakat, pemerintah dan pihak pengelola /pengusaha.
2. Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, terutama penanaman kehutanan dan kurang rasa tanggung jawab pengusaha pertambangan sehingga lahan tersebut ditinggalkan/dibiarkan begitu saja setelah eksploitasi yang berdampak kepada bertambahnya lahan kritis.

3. Kurangnya tenaga POLHUT yang produktif tidak sebanding dengan volume kerja / luas hutan yang ada di Provinsi Jambi dan kondisi POLHUT yang ada saat ini rata-rata sudah memasuki masa pensiun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan beberapa solusi guna meminimalisir permasalahan yang ada, antara lain :

1. Diadakan sosialisasi terhadap fungsi Lahan kepada masyarakat, dan pengusaha terhadap izin pengelolaan hutan sehingga tidak terjadi konflik.
2. Adanya pengembangan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Masyarakat dan Pemegang izin usaha seperti Hutan Desa (HD) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat dalam skema Perhutanan Sosial.
3. Penyediaan bibit untuk penanaman serta data wilayah yang termasuk lahan kritis sehingga dapat dilaksanakan penanaman di luar kawasan hutan.
4. Penambahan frekuensi kegiatan operasi gabungan dalam rangka pencegahan kegiatan perambahan dan illegal logging.
5. Mengusulkan penambahan tenaga POLHUT dan melakukan rekrutmen CPNS dan Inpassing.
6. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya aparat penegakan hukum dalam rangka sinkronisasi proses penyidikan tindak pidana illegal logging, perambahan hutan serta pembakaran hutan dalam kegiatan perlindungan hutan.
7. Pelaksanaan Sosialisasi tentang larangan kepada Masyarakat, Pemegang izin usaha agar jangan membakar hutan apabila akan membuka lahan.
8. Perlunya pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta bimtek tentang undang-undang Kehutanan dan Sanksinya terutama UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perambahan dan Perusakan Hutan (P3H).

Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kehutanan selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-isuStrategis

Isu Strategis yang lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi , antara lain sebagai berikut:

1. Hutan sebagai paru paru dunia.
2. Pengelolaan hutan secara lestari
3. Tingkat kerusakan hutan akibat Kebakaran dan okupasi
4. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
5. Akses kelola hutan melalui perhutanan sosial.

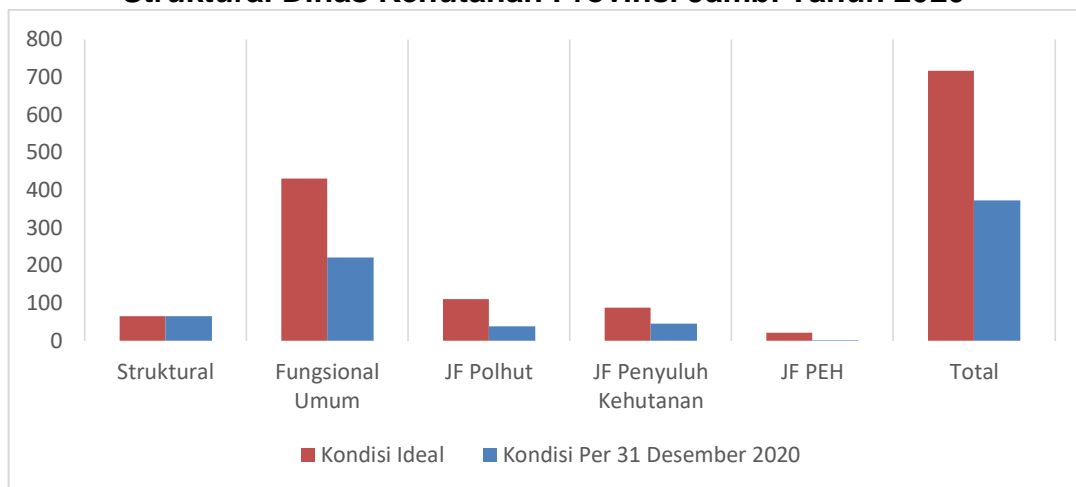
1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kehutanan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di dukung sumber daya yang tersebar dalam Instansi Induk (Dinas Kehutanan) dan UPTD KPHP.

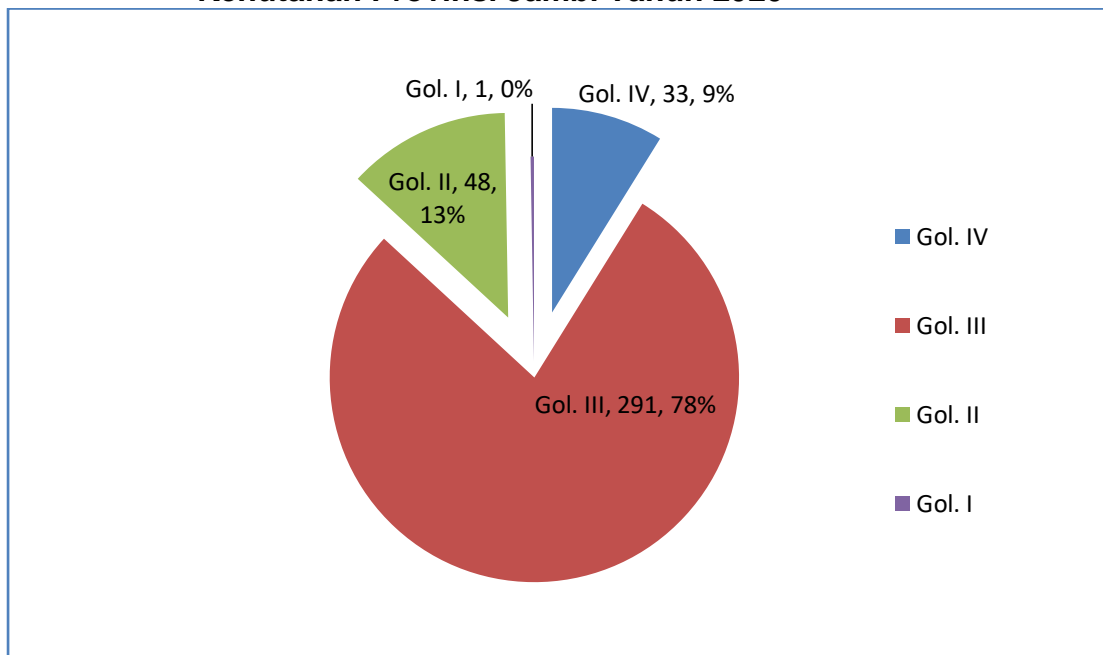
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2020, tercatat sebanyak 427 pegawai yang terdiri 60 pejabat struktural, 74 pejabat fungsional tertentu, 40 pejabat fungsional penyuluh kehutanan, 2 pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan dan 188 pejabat fungsional umum yang terbagi di Instansi Induk (Dinas Kehutanan Provinsi Jambi) sebanyak 125 pegawai yang terdiri dari 21 orang pejabat struktural, 18 pejabat fungsional tertentu (2 pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan, 16 pejabat fungsional polisi kehutanan) dan 71 orang fungsional umum.

Profil Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi disajikan dalam tabel berikut :

Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasarkan Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020



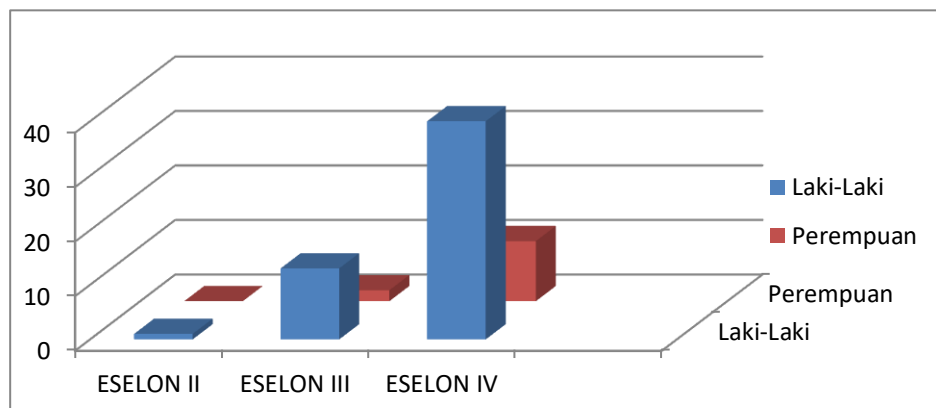
Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi terutama untuk jabatan fungsional umum, dan pegawai di Dinas Kehutanan sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:

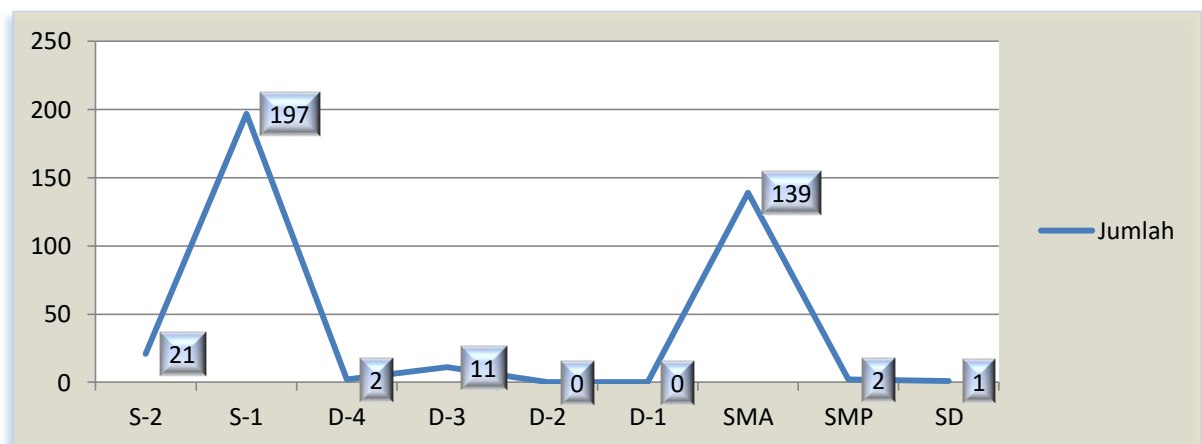
Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi belum mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya belum seimbang.

Profil kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.5. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 terkait dengan jabatan fungsional struktural yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Alat-alat angkutan	130	Baik
2	Alat kantor dan rumah tangga	3.284	Baik
3	Alat studio dan alat komunikasi	268	Baik
4	Bangunan gedung	214	Baik
5	Jaringan, saluran irigasi dan jembatan	178	Baik
6	Buku perpustakaan	4	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2020 berasal dari APBD Daerah Provinsi Jambi. Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.57.872.631.450,65,-** dengan rincian belanja tidak langsung sebesar **Rp.49.140.578.732.052.797** dan belanja langsung sebesar **Rp.8.732.052.797,-** yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung untuk mendanai **9** Program dan **103** kegiatan, terdiri dari **5** program rutin mencakup **31** kegiatan dan **4** program bidang mencakup **77** kegiatan.

Selain Dana APBD , Dinas Kehutanan Provinsi Jambi juga mengelola Dana APBN berupa :

Dana Tugas Pembantuan (TP) merupakan Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dengan total dana **Rp. 7.600.000.000,-** melalui dana APBN Tahun 2020. Tujuan dari kegiatan ini adalah pengendalian dan pengelolaan lahan gambut yang diharapkan pemeliharaan ekosistem gambut dan pemanfaatan gambut secara

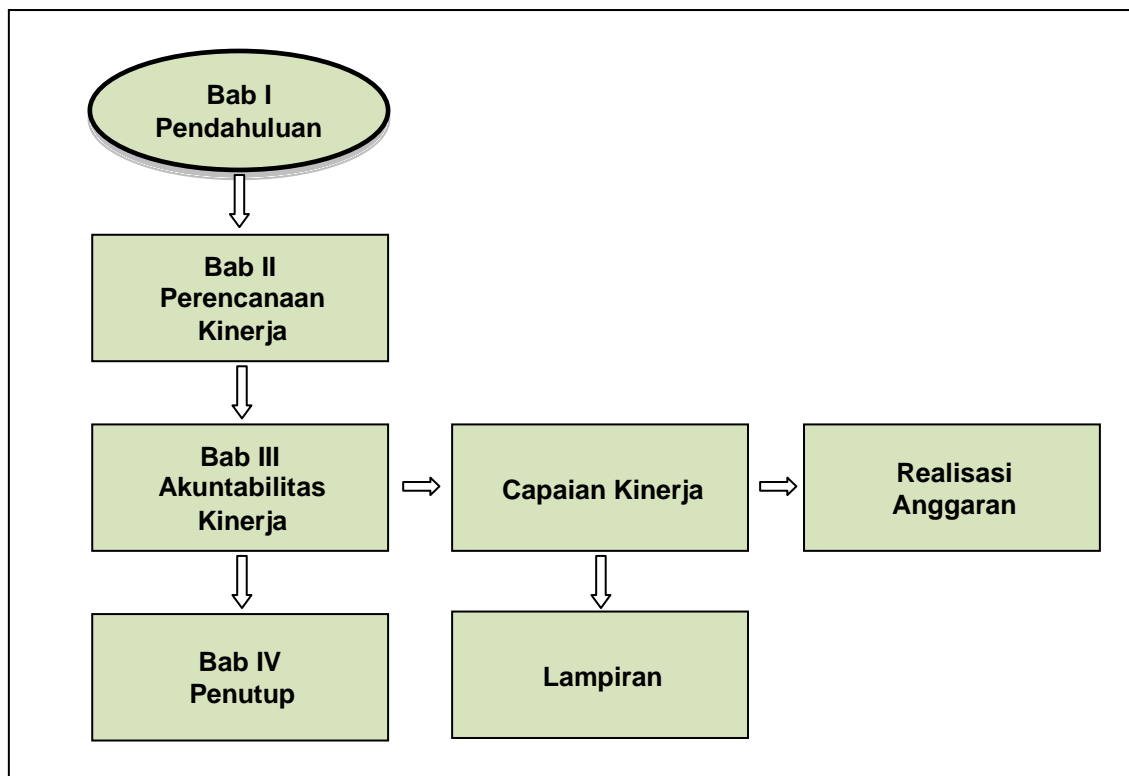
bijaksana sesuai dengan daya dukungnya. Adapun kegiatan ini terdiri dari 3 yaitu , Pembangunan Infrastruktur Pembahasan Gambut (PIPG), Revegetasi Tanaman melalui penanaman dan Revitalisasi pemberdayaan masyarakat pada kawasan hutan.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2020 menyajikan Pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Gambar 1.6 Sistematika Laporan



1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Potensi yang menjadi ruang lingkup pada dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

2.1 Perencanaan Strategis

Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016- 2021.tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2010 - 2015).

RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Jambi Tahun 201 - 2021.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 disebutkan bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan kondisi awal potensi, lingkungan strategis, kebijakan, visi dan misi pemerintah melalui pengkajian analisa SWOT. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 menggambarkan tentang misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan, yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk kebijakan, program serta kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

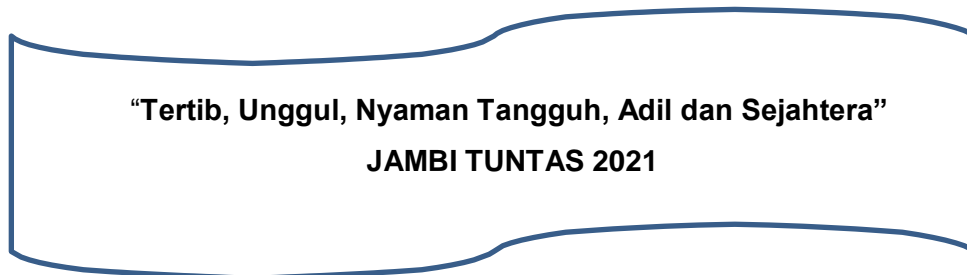
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan, sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2019, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 60 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 –2021.

Bab 2 berisi :

1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
3. Rencana Anggaran Tahun 2020
4. Instrumen Pendukung

2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur Jambi pada perencanaan periode 2016-2021 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur Jambi pada Sidang Paripurna Istimewa memaparkan pidato visi misi dengan tema :



Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi untuk periode 2016-2021 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Tahun 2010-2015. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur Jambi menyampaikan misi, yakni :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender
3. Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat
4. Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan
6. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Jambi 2016 - 2021

Visi: “ TUNTAS, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL “					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan Berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari	Persentase pengelolaan hutan yang lestari	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.	Persentase Kontribusi redistribusi daerah sektor Kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah /PAD.
				Meningkatnya peranserta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar
				Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis

Sumber : RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3. Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selama 5 tahun anggaran adalah:

“ Meningkatkan pengelolaan hutan yang lestari “

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan	Mengelola dan merencanakan pemanfaatan kawasan hutan secara baik	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun pengelolaan KPHL, dan KPHP berbasis geospasial digital.2. Membuat usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan3. Menyebarkan informasi kegiatan Dinas Kehutanan dan pemasaran hasil hutan di website.4. MembentukKelompok Tani Hutan5. Menunjuk lokasi PHBM6. Memfasilitasi pembentukan Hutan Adat7. Menggalakkan agrofostry dan agrofishery.8. Memfasilitasi penataan batas Hutan Desa, HTR, HKM dan Hutan Adat.9. Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial10. Mengembangkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu.11. Memberi bantuan mesin dan peralatan pengolahan hasil hutan non kayu.12. Memberi bantuan mesin dan peralatan pengolahan hasil hutan kayu kepada pemilik lahan hutan hak.13. Menambah HPH/HA dan Hutan Hak yang mendapat sertifikas ilegal14. Mensosialisasikan kepada masyarakat, pelaku usaha mengenai

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>pemanfaatan kayu rakyat dan teknologi pengolahan hasil hutan berwawasan lingkungan.</p> <p>15. Mengawasi dan pengendalian pada pemegang IUPHHK.</p> <p>16. Mengurangi jumlah kasus peredaran hasil hutan kayu ilegal</p> <p>17. Menambah jumlah IUPHHK HT/HA, IUIPHHK dan Hutan Hak yang sudah menggunakan aplikasi online untuk penatausahaan hasil hutan kayu.</p> <p>18. Pelaksanaan sosialisasi tata batas kawasan hutan untuk terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap batas kawasan hutan.</p> <p>19. Melakukan rekontruksi batas kawasan hutan sesuai dengan posisi berita acara tata batas.</p> <p>20. Melakukan pemeliharaan rintis batas dan Pal batas kawasan hutan.</p> <p>21. Mengevaluasi IPPKH.</p> <p>22. Menyelesaikan konflik kehutanan.</p> <p>23. Pemantapan dan Evaluasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK)</p>
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Menurunkan luas kawasan hutan dan lahan yang terbakar	<p>1. Melaksanakan Patroli dan Ground Check dalam rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan</p> <p>3. Membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA)</p> <p>4. Melaksanakan Operasi Pengamanan hutan dan Peredaran Hasil Hutan</p> <p>5. Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan</p> <p>6. Melakukan koordinasi dalam proses penegakan hukum kehutanan</p>

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Menurunkan luas lahan kritis di Provinsi Jambi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan dan pengembangan bibit / benih tanaman kehutanan untuk KPH , Taman Hutan Kenali danTAHURA. 2. Melakukan Penanaman, dan pemeliharaan pohon pada Hutan Wisata, KPH, TAHURA, Arboreteum, Tanaman Unggulan local dan HutanAdat 3. Membuat Bibit Tanaman Kehutanan yang berkualitas (setifikat) dan koleksi Tumbuhan Dataran RendahSumatera 4. Monitoring Pengelolaan DAS 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi diluar kawasan hutan di IIKPHP 6. Melakukan Rehabilitasi kawasan hutan di IIKPHP 7. Memelihara tanaman pada kawasan hutan di 11KPHP 8. Meningkatkan pengelolaan KPH, Tahura, Hutan Kota, Hutan Rakyat dan Pengembangan usaha ekonomi produktif.

Sumber : Renstra Dinas Kehutanan 2016-2021

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2016	Target Tahunan					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.	Persentase Kontribusi redistribusi daerah sektor Kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah /PAD	%	0,01%	1,0 %	0,7 %	0,5%	0,5 %	1,5 %	1,5 %
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan'	persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	%	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %	25 %
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis	%	0 %	0,1%	0,1%	0,1%	0,1 %	0,1%	0.5%

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang berkelanjutan.	Persentase Kontribusi redistribusi daerah sektor Kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah /PAD	0,5%
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan hutan	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar.	5 %
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.	Persentase penurunan lahan kritis.	0,1%

Sumber : Dinas Kehutanan, 2020

2.2 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 73.328.555.660,56,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp. 57.344.187.169,56,-** dan Belanja Langsung **Rp.15.984.368.491,-**. Melalui mekanisme perubahan refocusing APBD 2020 menjadi sebesar **Rp. 57.872.631.450,65,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung **Rp.49.140.578.732.052.797,-** dan Belanja Langsung **Rp .8.732.052.797,-**

2.3.1 Target Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar **Rp. 57.872.631.450,65,-** dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 49.140.578.732.052.797,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 8.732.052.797,**

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang berkelanjutan.	777.209.000	16,44 %	1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program Perencanaan dan Pengembangan
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan	811.935.760	17,18 %	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	3.135.707.237	66,36 %	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	Jumlah	4.724.851.997		

Sumber : Dinas Kehutanan, 2020

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Jambi. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 berisi :

1. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
3. *Realisasi Anggaran*

1.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE warna
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang berkelanjutan	Persentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah /PAD	%	0,5 %	0,57 %	114 %	Hijau Tua
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	%	5 %	79,5 %	1.590 %	Merah
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis.	%	0,1 %	0,28 %	280 %	Hijau Tua

Sumber : Dinas Kehutanan., 2020

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memiliki 3 (tiga) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Pada tahun 2020, semua indikator sasaran memenuhi target yang ditetapkan (tercapai $\geq 100\%$). Khusus untuk indikator persentase penurunan kawasan hutan dan lahan yang terbakar adanya penurunan luas kawasan hutan terbakar sebesar 79,5% disebabkan oleh beberapa faktor pendukung antara lain cuaca dan lintas patroli serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya Karhutla.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun 2020, capaian kinerja secara menyeluruh dari program dan kegiatan rata-rata 98,46 %. Secara detil capaian kinerja tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran sebagai berikut :

Sasaran #1: Meningkatkan Pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan dengan indikator kinerjanya yakni Persentase pengelolaan hutan yang lestari. Sasaran ini dicapai melalui program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1. Pengembangan Hutan Tanaman
2. Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
3. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
4. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
5. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
6. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit I Kerinci
7. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit II dan III Bungo
8. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IV, V dan VI Merangin
9. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VII Hulu Sarolangun
10. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
11. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
12. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit X Tebo Timur
13. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
14. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIII Muaro Jambi
15. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
16. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di KPHP Unit XV, XVI, XVII Tanjung Jabung Barat
17. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Hasil Hutan di UPTD TAHURA

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Jumlah IUPHHK-HTI Yang dilaksanakan / monitoring evaluasi / pemeriksaan pemenuhan kewajibannya.	4 IUPHHK-HTI	4 IUPHHK-HTI	100 %
2.	Meningkatnya Pengelolaan Hutan Yang lestari	Jumlah Fasilitasi Penguatan kelembagaan kelompok Perhutanan Sosial	10 Pemegang Izin	10 Pemegang Izin	100 %

3.	Meningkatnya Industri kayu yang legal, efisien dan didukung	Jumlah monitoring pembinaan IUPHHK HT / HA dan Hutan	4 HT/HA Industri dan Hutan Hak	4 HT/HA Industri dan Hutan Hak	100 %
	Bahan baku yang berkelanjutan. Meningkatnya tertib peredaran hasil hutan oleh masyarakat dan pelaku usaha di Provinsi Jambi	Hak yang sudah menggunakan aplikasi online untuk penatausahaan hasil hutan kayu. PNPB	100 %	100%	100 %
4.	Meningkatnya Industri kayu yang legal, efisien dan didukung bahan baku yang berkelanjutan.	Jumlah Industri yang di Monitoring dan di Evaluasi	4 IUPHHK	4 IUPHHK	100%
5.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah pemohon izin HHBK yang di Fasilitas Jumlah Pemegang Izin HHBK yang dimonitoring/dievaluasi. Jumlah pengelolaan potensi HHBK di UPTD KPHP.	1 Pemohon 1 Izin HHBK 1 UPTD KPHP	1 Pemohon 1 Izin HHBK 1 UPTD KPHP	100% 100 % 100 %
6.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha di UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah KTH yang di Bina dalam pengelo Laan hutan secara Lestari pasca Bantuan Alat Ekonomi Produktif.	2 KTH	2 KTH	100 %
7.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III.	Jumlah Monitoring Dan Fasilitas PNPB Dan PAD sektor Kehutanan dalam Setahun. Jumlah Pemantauan dan Pembinaan Pemanfaatan hutan dalam setahun.	2 Kali 2 Kali	2 Kali 2 Kali	100 % 100 %
8.	Meningkatnya peran serta	Jumlah Pembinaan Dan Monitoring izin	5 kali	5 kali	100 %

	masyarakat dan dunia usaha di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI.	Yang difasilitasi. Jumlah Monitoring Peredaran hasil hutan Yang difasilitasi	2 kali	2 kali	100 %
		Jumlah Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan yang difasilitasi.	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %
9.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha di UPTD KPHP Unit VII Hulu Sarolangun	Jumlah laporan Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
10.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun.	Jumlah Pemegang Izin yang dimonitor Dan dibina terhadap Pembayaran PNB	8 Izin	8 Izin	100 %
11.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha di UPTD KPHP Tebo BaratUnit IX.	Jumlah Pemegang Izin yang dimonitor Dan dibina terhadap Pembayaran PNB	4 Izin	4 Izin	100 %
		Jumlah Pemegang Izin yang dimonitoring Dan dibina terhadap Pemanfaatan Hutan.	2 Izin	2Izin	100 %
12.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha di UPTD KPHP Tebo TimurUnit X.	Jumlah fasilitasi Kemitraan Kehutanan 5 kelompok.	3 Kali	3 Kali	100 %
		Jumlah Monitoring Dan Pembinaan terhadap pembayaran PNB pada Pemegang Izin	5 kali	5 kali	100 %
13.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha di UPTD KPHP	Jumlah Monitoring dan fasilitasi PNB dan PAD Sektor Kehutanan.	3 Laporan	3 Laporan	100 %
		Jumlah Monitoring	3 Laporan	3 Laporan	100 %

	BatanghariUnit XI dan XII.	Dan pemantauan Izin usaha Pemanfaatan Hutan. Jumlah Fasilitas Kerjasama dan Kemitraan Kehutanan	1 Kemitraan	1 Kemitraan	100 %
14.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha di UPTD KPHP Muaro JambiUnit XIII.	Jumlah Industri yang Dibina. Jumlah Izin Usaha Pemanfaatan hutan Jumlah Industri Penatausahaan Hasil Hutan, luran Kehutanan dan peredaran hasil hutan yang diawasi	5 Industri 5 Industri 5 Industri	5 Industri 5 Industri 5 Industri	100 % 100 % 100 %
15.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha di UPTD KPHP Tanjab TimurUnit XIV.	Jumlah Pemanfaatan Dan pengembangan Hasil hutan. Jumlah Monitoring Dan fasilitas PNBPDari Pemegang izin. Jumlah Fasilitas kerjasama dan Kemitraan	2 Kelompok 5 Kali 2 Kelompok	2 Kelompok 5 Kali 2 Kelompok	100 % 100 % 100 %
16.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha di UPTD KPHP Tanjab BaratUnit XV, XVI dan XVII.	Jumlah Monitoring Yang difasilitasi. Jumlah pemantauan Izin di areal KPHP/ KPHL yang difasilitasi Jumlah rapat kerja Sama dan kemitraan yang difasilitasi	2 Kali 2 Kali 1 Kemitraan	2 Kali 2 Kali 1 Kemitraan	100 % 100 % 100 %
17.	Meningkatnya peran Serta masyarakat Dan dunia usah di UPTD Taman Hutan Raya (TAHURA)	Jumlah fasilitas kerjasama dan Kemitraan.	1 kemtraan	1 Kemitraan	100 %

Keberhasilan dari Program ini adalah capaian penerimaan negara melalui PNBP yaitu :

- a. Penerimaan Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 52.650.269.516,- dari target Rp. 38.929.230.242,- (135,24 %).
- b. Dana Reboisasi (DR) Rp. 14.810.891.517,- dari target Rp.4.221.824.423,- (350,8%).

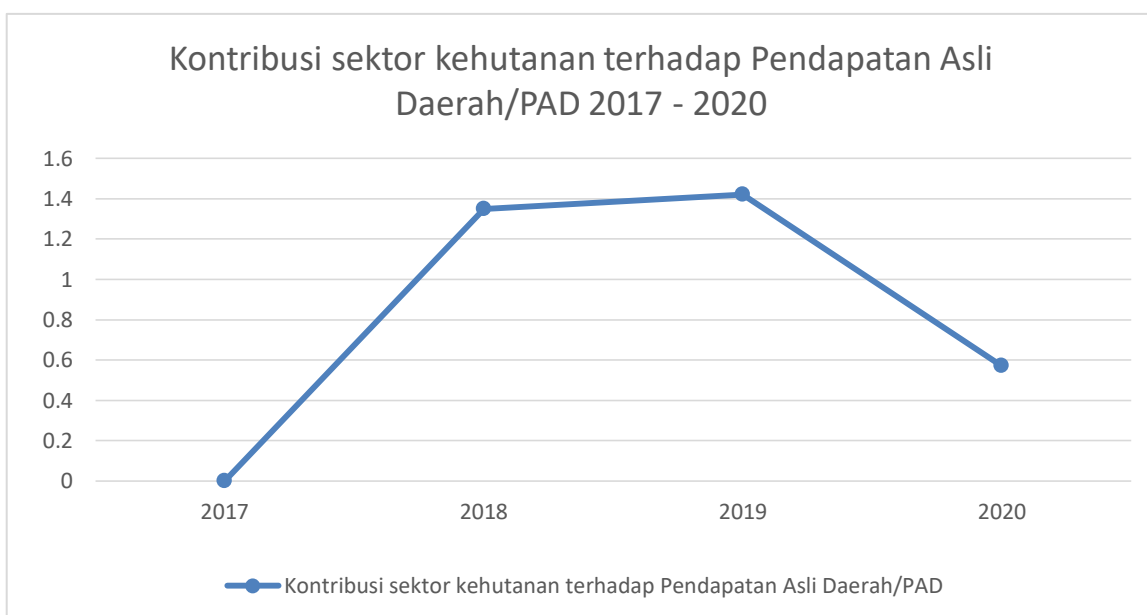
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Capaian Kinerja 2017-2020

No.	Indikator	Capaian			Capaian 2020		
		2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Kontribusi sektor kehutanan terhadap Pendapatan Asli Daerah/PAD	-	1,35%	1,42%	0,5 %	0,57%	114 %

Capaian Kinerja Tahun 2020 baik karena melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh potensi sumber daya hutan dapat di manfaatkan secara optimal dan lestari sesuai dengan fungsinya.

Gambar 1.7 . Grafik Capaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan



Sasaran #2: Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan indikator kinerjanya yakni Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar. Sasaran ini dicapai melalui program Perencanaan dan pengembangan Hutan yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pengelolaan KPH /KPHL
2. Kegiatan Akses layanan informasi pemasaran hasilhutan
3. Kegiatan Pemantapan dan Evaluasi pelaporan rencana aksi daerah gas rumah kaca (PEP RADGRK)
4. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit 1Kerinci
5. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit II dan IIIBungo
6. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit IV, V dan VIMerangin
7. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit VII HuluSarolangun
8. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit VIII HilirSarolangun
9. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit IX Tebo Barat
10. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit X Tebo Timur
11. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XI dan XII Batanghari
12. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XIII MuaroJambi
13. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XIV Tanjung Jabung Timur
14. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di KPHP Unit XV, XVI dan XVII Tanjung JabungBarat
15. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Hutan di UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
16. Kegiatan Pengelolaan HutanKenali

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha.	Jumlah peta informasi kehutanan berbasis geospasial digital sebagai bahan penyusunan rencana dan evaluasi pembangunan kehutanan.	0 Peta	0 Peta	0
		Jumlah Dokumen Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2	Meningkatnya partisipasi dan promosi kehutanan.	Jumlah Pelaksanaan Pameran dan Update Data Pembangunan Kehutanan pada Website	2 kali Pameran	2 Kali Pameran	100%
3	Meningkatnya Pelayanan Publik	Jumlah Rapat Koordinasi Pertemuan RAD GRK per UPTD KPHP	2 Kali	2 Kali	100%
		Jumlah Rapat Koordinasi Keluar Daerah Terkavit Pelaporan RAD GRK	1 Kali	1 Kali	100%
4	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD KPHP Kerinci Unit I	Jumlah Update Data Pembangunan Kehutanan	6 Sistem Informasi	6 Sistem Informasi	100%
5	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kehutanan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Jumlah Perluasan Akses dan Informasi	1 Laporan	1 Laporan	100%
6	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI	Jumlah RPHJP yang disusun dan difasilitasi	1 Paket	1 Paket	100%
		Jumlah Inventarisasi/Cek Potensi jasa Lingkungan HHBK yang difasilitasi	1 Kali	1 Kali	100%
7	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD KPHP Hulu Sarolangun Unit VII	Jumlah Laporan Perluasan Akses Pengelolaan Hutan dan Akses Informasi	1 Laporan	1 Laporan	100%

8	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun	Jumlah Pemegang Izin yang dimonitoring dan dibina terhadap Pemanfaatan Hutan dalam Pembangunan Potensi Pengelolaan Hutan Secara Lestari	2 Izin	2 Izin	100%
9	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD KPHP Tebo Barat Unit X	Jumlah Pemegang Izin yang dimonitoring dan dibina terhadap Pemanfaatan Hutan dalam Pembangunan Potensi Pengelolaan Hutan Secara Lestari	2 Izin	2 Izin	100%
		Jumlah Pemahaman Masyarakat terhadap Kawasan Hutan	1 Desa	1 Desa	100%
		Jumlah Izin Perhutanan Sosial	1 Izin	1 Izin	100%
10	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X.	Jumlah Monitorng Pelaksanaan/Penyusunan RKT/ Target Tahunan	1 Kali	1 Kali	100%
		Jumlah Penandaan Batas Perhutanan Sosial	1 Kali	1 Kali	100%
		Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Informasi	3 Sistem Informasi	3 Sistem Informasi	100%

11	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD KPHP Batanghari Unit X	Jumlah Fasilitas Penandaan Tanda Batas IUPHH Perhutanan Sosial	2 IUPHHK-PS	2 IUPHHK-PS	100%
		Jumlah Fasilitas Pengecekan Hasil Cruising pada IUPHH Perhutanan Sosial	3 IUPHH-PS	3 IUPHH-PS	100%
12	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII	Jumlah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dipantau	2 IPPKH	2 IPPKH	100%
		Jumlah Lokasi Kawasan Hutan yang diokupasi Pihak Ketiga dan yang dimonitoring	2 Lokasi	2 Lokasi	100%
		Jumlah Rencana Kerja Kegiatan dan Program kerja Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
13	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD KPHP Tanjab Timur Unit XIV	Jumlah Pelacakan Batas Luar Kawasan Hutan	10 Km	10 Km	100%
		Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan Oleh Pemegang Izin (HD, HKm, IUPHHK-HTI, IPPKH)	1 kali	1 kali	100%
14	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD KPHP Tanjab Barat Unit	Jumlah Inventarisasi Hutan yang difasilitasi	1 Kali	1 Kali	100%

	XV, XVI dan XVII	Jumlah Rapat Tata Kelola Hutan yang difasilitasi	1 Kali	1 Kali	100%
15	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari di UPTD TAHURA	Jumlah tata kelola wilayah kawasan hutan	1 tahun	1 tahun	100%
16	Peningkatan pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	Jumlah Luas Hutan Kenali yang dipelihara	10 Ha	Taman Hutan Kenali seluas 10 Ha yang terpelihara	100%
			1 Unit embung	Tidak terealisasi	100%
			Penerimaan Restribusi Daerah Rp. 30.000,000,-	Realisasi Penerimaan Retribusi Rp.39.124.500,-	

Keberhasilan program ini adalah capaian penerimaan dari retribusi daerah sebesar Rp. 39.124.500,- dari target Rp. 30.000.000,- (30,4%). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Capaian Kinerja 2017-2020

No	Indikator	Capaian			Capaian 2020		
		2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	47,74%	12,45%	-597 %	5 %	79,5%	1,590%

Luas hutan yang terbakar pada Tahun 2020 menurun dibanding dengan kebakaran hutan pada Tahun 2019 di karenakan musim kemarau yang normal.

Gambar 1.8 Grafik Capaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.



Sasaran 3# : Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan di Provinsi Jambi dengan indikator kinerja yakni Persentase Penurunan Lahan Kritis, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

1. Pengendalian dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
2. Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
3. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan
4. Evaluasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Provinsi Jambi
5. Fasilitasi Penanganan Konflik dalam Kawasan Hutan
6. Pemantapan Kawasan Hutan
7. Konservasi Kawasan Esensial (Bernilai Ekosistem Penting) dan Keanekaragaman Hayati
8. Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
9. Groundcheck Hotspot (Pengecekan Titik Panas) Kebakaran Hutan dan Lahan
10. Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
11. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
12. Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan
13. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I
14. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
15. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI

16. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
17. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
18. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
19. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
20. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
21. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
22. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
23. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
24. Pengamanan Hutan dan Perlindungan Hutan di UPTD TAHURA (Taman Hutan Raya)
25. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan
26. Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata
27. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
28. Monitoring Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
29. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Kerinci Unit I
30. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Bungo Unit II dan III
31. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI
32. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun
33. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun
34. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX
35. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tebo Timur Unit X
36. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII
37. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII
38. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV
39. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII
40. Rehabilitasi Kawasan Hutan di UPTD TAHURA

Adapun pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Monitoring SDM dan Sarpras Pengendalian Karhutla	6 UPTD KPHP dan 7 Perusahaan	6 UPTD KPHP dan 7 Perusahaan	100 %
2	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pelaksanaan Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	10 Kali	10 Kali	100 %
		Jumlah Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan	9 Kali	9 Kali	100 %
		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan TIPIHUT	2 Kali	2 Kali	100 %
		Jumlah Pelaksanaan Pemasangan Papan Larangan TIPIHUT	10 Unit	10 Unit	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Hutan Yang Lestari.	Jumlah Pelaksanaan temu Penyuluh Kehutanan	1 Kali	1 Kali	100 %
		Jumlah Lomba Wanalestari yang terlaksana	1 Kali	1 Kali	100 %
4	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pemegang IPPKH/ Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan yang di Monitoring dan di Evaluasi Pemenuhan Kewajibannya	1 Pemegang IPPKH	1 Pemegang IPPKH	100 %

		Jumlah Permohonan IPPKH/ Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan yang dilaksanakan Orientasi/ Pemeriksaan Lapangannya	1 Permohonan IPPKH	1 Permohonan IPPKH	100 %
5	Meningkatnya Pengelolaan Hutan Yang Lestari .	Pendataan Potensi Konflik Tenurial pada Hutan Adat di Provinsi Jambi	4 Ha di Prov.Jambi	4 Ha di Prov.Jambi	100 %
		Jumlah Penanganan Konflik yang Difasilitasi	6 Konflik	6 Konflik	100 %
6	Meningkatnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Terbangunnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kawasan Hutan	6 UPTD KPHP	6 UPTD KPHP	100 %
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha.	Jumlah Identifikasi Kawasan Esensial di Provinsi Jambi	11 KPH	11 KPH	100 %
		Rumah Anggrek	1 Unit	1 Unit	100 %
8	Meningkatnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha.	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terbakar	5 Kali	5 Kali	100 %
		Jumlah Pelatihan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar	5 kali	5 kali	100 %
9	Meningkatnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha.	Jumlah Pelaksanaan Groundcheck Hotspot dan Patroli dalam Rangka Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	195 Kali	195 Kali	100 %

10	Meningkatnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Media	4 Media	4 Media	100 %
		Jumlah Pembuatan bahan Kampanye Karhutla (Brosur dan Kalender)	1500 lembar, 100 set	1500 lembar, 100 set	100 %
11	Meningkatnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha.	Jumlah Pelaksanaan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Kali	10 Kali	100 %
12	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah pelatihan tehnik pembukaan lahan tanpa bakar	10 kali	10 Kali	100 %
13	Meningkatnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah monitoring hotspot Kebakaran Hutan dan Lahan	265 kali	265 Kali	100 %
14	Meningkatnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	27 Kali	27 Kali	100 %
15	Meningkatnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah pelaksanaan monev Bekas areal Kebakaran Hutan dan Lahan	26 Kali	26 Kali	100 %
16	Meningkatnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah penyediaan sarana dan Prasarana penunjang pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan	1 Unit Mobil, 10 Unit Pompa, 2 Unit Laptop	1 Unit Mobil, 10 Unit Pompa, 2 Unit Laptop	100 %
17	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (UPTDKPHP Kerinci UnitI)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	11 Kali	11 Kali	100 %
18	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	6 Kali	6 Kali	100 %

19	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	11 Kali	11 Kali	100 %
20	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	11 Kali	11 Kali	100 %
21	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (UPTD KPHP Hilir Unit VIII Sarolangun)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	1 Tahun	1 Tahun	100 %
22	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	8 Kali	8 Kali	100 %
23	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (UPTD KPHP Tebo Timur Unit X)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	10 Kali	10 Kali	100 %
24	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	10 Kali	10 Kali	100 %
25	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	9 Kali	9 Kali	100 %
26	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	1 Tahun	1 Tahun	100 %
27	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha (UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI, XVII)	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	10 Kali	10 Kali	100 %

28	Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari .	Jumlah Patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan	11 Kali	11 Kali	100 %
29	Penurunan Lahan Kritis	Jumlah Pengadaan Bibit/ Benih Tanaman Kehutanan	10.000 batang	Tersedianya bibit tanaman hutan sebanyak 10.000 batang terdiri dari: Kemiri, tembesu, Bulian (Ulin), Mangga, Kelengkeng, Durian Daun, Tempunik, Tampoi	100 %
30	Peningkatan pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	Luas Penanaman Pohon Pada KPHP	445 Ha	445 Ha	100 %
31	Meningkatnya reklamasi dan RHL pada areal kawasan hutan	Luas Pemeliharaan Arboreteum dan Tanaman Unggulan Lokal dan Hutan Adat	22 Ha	22 Ha	100 %
32	Meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung DAS	Jumlah Lokasi Kegiatan Monev Pengelolaan DAS Provinsi Jambi	11 UPTD KPHP	11 UPTD KPHP	100 %
33	Meningkatnya luasan tutupan lahan (UPTDKPHP Kerinci Unit I)	Jumlah Luas Pemeliharaan Tahun I	5 Ha	5 Ha	100 %
34	Meningkatnya luasan tutupan lahan (UPTD KPHP Bungo Unit II dan III)	Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan tahun 1	5 Ha	5 Ha	100 %
35	Meningkatnya luasan tutupan lahan (UPTDKPHP Merangin Unit IV, V dan VI)	Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan tahun 1	5 Ha	5 Ha	100 %
36	Meningkatnya luasan tutupan lahan (UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun)	Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan tahun 1	5 Ha	5 Ha	100 %
37	Meningkatnya luasan tutupan lahan (UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun)	Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan tahun 1	5 Ha	5 Ha	100 %

38	Meningkatnya luasan tutupan lahan (UPTD KPHPTebo Barat Unit IX)	Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan tahun 1	5 Ha	5 Ha	100 %
39	Meningkatnya luasan tutupan lahan (UPTD KPHPTebo Timur Unit X)	Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan tahun 1	5 Ha	5 Ha	100 %
40	Meningkatnya luasan tutupan lahan (UPTDKPHP Batanghari Unit XI dan XII)	Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan tahun 1	5 Ha	5 Ha	100 %
41	Meningkatnya luasan tutupan lahan (UPTD KPHPMuaro Jambi Unit XIII)	Luas Penanaman dan pemeliharaan tahun berjalan dan tahun 1	5 Ha	5 Ha	100 %

Keberhasilan dari Program ini adalah :Peningkatan tutupan lahan kritis atas dukungan berbagai pihak yaitu 0,28 % dari target 0,1 %.Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8. Capaian Kinerja 2017- 2020

No	Indikator	Capaian			Capaian 2020		
		2017	2018	2019	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penurunan lahan kritis.	0,08%	0,11%	0,37 %	0,1 %	0,28 %	280 %

Capaian penurunan lahan kritis terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 0,08% menjadi 0,11 % dan naik menjadi 0,37 % tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 di banding dengan tahun sebelumnya. Tutupan lahan kritis akan meningkat apabila adaya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan dan melakukan rehabilitasi hutan.

Gambar 1.9 Grafik Capaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi



Jika dilihat perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sebagaimana terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.9 Capaian Kinerja s.d. Jangka Menengah Daerah

No.	Indikator	Awal RPJMD 2016	Capaian (%)				Target s/d 2021 (%)	Capaian s/d 2020 terhadap targets/d 2021 (%)
			2017	2018	2019	2020		
1.	Persentase Kontribusi redistribusi daerah sektor kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah /PAD	0,01 %	0,92	0,37	1,42	0,57	4,7	69,78
2.	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	5%	47,74	12,45	- 597	79,5	25	7
3.	Persentase penurunan lahan kritis.	0,1 %	0,08	0,11	0,37	0,28	0,5	168

- Capaian kinerja kontribusi redistribusi daerah sektor kehutanan terhadap PAD dibandingkan target s/d tahun 2021 sebesar 69.78%, artinya capaian Dinas Kehutanan masih dibawah target yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi hal ini disebabkan pada tahun 2020 menurunnya aktivitas perekonomian dampak dari pandemi covid 19.

- Capaian kinerja Penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar terhadap target yang ditetapkan s/d tahun 2021 sebesar 7 % artinya capaian Dinas Kehutanan belum mencapai target yang telah ditetapkan, karena luas lahan dan hutan terbakar melebihi dari target yang signifikan pada tahun 2019 karena dipicu dengan kondisi cuaca ekstrim.
- Capaian kinerja penurunan lahan kritis s/d tahun 2020 terhadap target s/d 2021 sebesar 168 % artinya Dinas Kehutanan telah melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini hasil dari upaya Dinas Kehutanan dalam memberdayakan masyarakat serta mengefektifkan penanaman dari kompensasi pinjam pakai IUPKH.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

- a. Program dan kegiatan yang melibatkan instansi atau pihak lain diluar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Kepolisian, Kejaksaan, Manggala Agni dan Instansi– Instansi vertikal lainnya), membutuhkan kordinasi dan konsultasi yang tidak mudah untuk mensinkronkan jadwal dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Hal ini juga menyebabkan ada beberapa kegiatan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang realisasinya masih belum memuaskan.
- b. Komitmen pemegang izin dalam memenuhi kewajibannya terhadap PNPB PSDH dan Dana Reboisasi.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor cuaca
- b. Minimnya Anggaran yang di sediakan
- c. Kurangnya jumlah personil yang terlibat
- d. Kurangnya sarana dan prasarana
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp..598.010.682,- (98,46%) dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 4.703.664.521,- (98,96%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.3.894.346.161(97,86 %). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagai berikut:

1. APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp.47.167.174.684,27,- (96,69%);
2. APBD Belanja langsung sebesar Rp 8.598.010.682,- (98,46%) ;
3. Dana Tugas Pembantuan Rp.7.321.443.489,-(96,33%)

Realisasi anggaran yang dikelola Dinas Kehutanan Tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD untuk program utama sebesar Rp 4.703.664.521 (98,96 %) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp. 4.752.938.127,- (98,96%);
2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung APBN: Dana Tugas Pembantuan Rp. 7.321.443.489,- (96,33%);
3. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp. 3.894.346.161,- (93,44%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp. 3.979.114.670,- (97,86%);
4. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.47.167.174.684,27,- (96,69%) dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.48.783.042.686,- (96,69%).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020**

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Realisasi %	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.	Persentase kontribusi redistribusi daerah sektor kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah / PAD	0,5%	1,0 %	200 %	777.209.00	772.277.070	99,37
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	5%	79,5 %	1,590%	811.935.760	795.680.214	98,00
3	Meningkatnya luasan tutupan lahan hutan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis	0,1 %	0,28 %	280 %	3.163.793.367	3.135.707.237	99,11
Belanja langsung pendukung						3.979.114.670	3.894.346.161	97,86
Belanja tidak langsung						48.783.042.686	47.167.174.684,27	96,69
Jumlah belanja langsung						8.732.052.797	8.598.010.682	98,46
Total Belanja						61.360.168.038	59.793.573.642,27	97,44

Sumber : Dinas Kehutanan, 2020

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Analisis efisiensi Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥ 1	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan.	Persentase kontribusi redistribusi daerah sektor kehutanan terhadap total Pendapatan Asli Daerah / PAD	1,0 %	99,37	0,63 %
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar	79,5 %	98,00	2 %
3.	Meningkatnya luasan tutupan lahan hutan di Provinsi Jambi	Persentase penurunan lahan kritis	0,28 %	99,11	0,89 %

Sumber : Dinas Kehutanan, 2020

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, kinerja sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melebihi target, dengan rata- rata tingkat efisiensi sebesar 1,54 %. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi penggunaan alokasi anggaran dalam memenuhi capaian kinerja.

BAB 4

Penutup

Bab 4 berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kehutanan pada Tahun Anggaran 2019 merupakan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kehutanan tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Dari analisis sasaran perangkat daerah “ Meningkatnya pengelolaan hutan yang lestari ”, dengan indikator Persentase kontribusi retribusi sektor kehutanan terhadap PAD mencapai 0,57 % dan peningkatan luasan tutupan lahan hutan di Provinsi Jambi sebesar 0,28 % sementara peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diukur dari penurunan luas hutan dan lahan terbakar mengalami penurunan dengan capaian 79,5%.
- Realisasi kinerja Dinas Kehutanan telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu :
 1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang berkelanjutan sebesar 1,0 % dengan efisiensi anggaran sebesar 0,63%
 2. Meningkatnya luasan tutupan lahan hutan di Provinsi Jambi sebesar 0,37 % dengan efisiensi anggaran sebesar 2%.
 3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi serta stakeholder yang terkait.
2. Memaksimalkan perencanaan dan meningkatkan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.